

Dana Jalan Tol Trans Sumatera dari APBN

PT Hutama Karya mendapat suntikan modal Rp 2 triliun dari APBNP-2013

Fahriyadi

JAKARTA. Pemerintah bertekad mempercepat realisasi pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Jalan tol ini diharapkan bakal menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.

Kini Kementerian Pekerjaan Umum tengah menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2005 tentang Jalan Tol. Revisi ini untuk menyisipkan aturan agar pemerintah bisa menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggarap ruas tol ini.

Maklum saja, jika mengikuti aturan lama, pembangunan jalan tol ini harus lewat tender. Pemerintah memprediksi minat investor swasta untuk menggarap tol trans Sumatera sangat minim. Investor swasta melihat proyek ini secara finansial tidak layak alias tidak menguntungkan.

Contohnya adalah tender tiga ruas tiga tol trans Sumatera yakni tol Palembang-Indralaya, Medan-Binjai, dan Bakauheni-Lampung. Hingga kini tak ada satupun investor yang minat menggarapnya.

Itu sebabnya, pemerintah ingin mengerahkan kekuatan BUMN agar proyek infrastruktur ini bisa tetap jalan. Meski sejatinya pembangunan infrastruktur jalan seperti ini harusnya menjadi tugas negara.

Untuk memuluskan rencana ini Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menyatakan sudah menekan draf revisi PP No 15/2005. Kini revisi ini tinggal menunggu persetujuan Presiden untuk diterbitkan. Revisi beleid ini nantinya akan menugaskan BUMN yang modalnya 100% dimiliki pemerintah.

Jika PP sudah keluar, maka pemerintah memungkinkan untuk menunjuk BUMN agar menggarap proyek jalan tol.

"Yang sudah ditender tapi sepi peminat," kata Djoko akhir pekan lalu.

Karena itu untuk tahap awal BUMN tersebut akan mengerjakan tiga ruas tol yang pernah ditender tapi gagal menjerang peminat. Setelah lancar kemungkinan akan menugaskan mereka untuk menggarap proyek tol lainnya si ruas tol trans (lihat *Infografik*).

Pemerintah telah membagi tiga koridor proyek jalan tol trans Sumatera. Proyek ini terdiri dari 23 ruas dengan total panjang selidtar 2.628 km

detail soal BUMN yang ditunjuk. Kami harapkan perpresnya bisa keluar pada tahun ini juga," imbuh Djoko.

Pemerintah merencanakan

Jalan tol trans Sumatera digarap BUMN lantaran swasta tak berminat.

program pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini berlangsung selama periode 2013-2025. Nah, untuk mendukung program tersebut, pemerintah mengalokasikan dana penyertaan modal negara sebesar Rp 2 triliun kepada PT

Hutama Karya (HK) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2013.

Penyertaan modal negara bagi PT Hutama Karya pada tahun 2013 akan digunakan untuk pembiayaan sebagian pembebasan lahan, pembuatan *detailed engineering design* (DED). Sebagian lain dari anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai tahap pembangunan di sejumlah ruas jalan tol yang telah siap.

Tentu saja dana Rp 2 triliun tak cukup bagi Hutama Karya untuk menyelesaikan proyek raksasa ini. Perusahaan ini masih membutuhkan kecuran dana, termasuk dari perbantuan terutama. Berdasarkan hitungan Kementerian BUMN, proyek jalan tol trans Sumatera ini membutuhkan dana sekitar Rp 89 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Hatta Rajasa, berharap proyek jalan tol ini digarap lebih cepat. Ia menargetkan ruas jalan tol trans Sumatera ini bisa beroperasi pada tahun 2022, demi menopang ekonomi Sumatera. ■



melewati sembilan provinsi. Perinciannya, koridor utama sepanjang 1.833 km, koridor pendukung sepanjang 770 km serta ruas Batu Ampar-Muka Kuning-Bandar Hang Nadim sepanjang 25 km.

Hutama Karya ditunjuk

Tahap selanjutnya, untuk menunjuk BUMN yang bakal membangun jalan tol Trans Sumatera, pemerintah akan menerbitkan peraturan presiden (perpres). "Perpres ini yang lebih telus mengatur